

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswel dan Abraham Kaplan, kebijakan publik merupakan program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai, dan praktik tertentu (aprojected program of goals, values, and practices). Di sisi lain, Carl I. Friedrick memandang kebijakan sebagai wujud niat dan usaha bersama yang lahir dari individu, kelompok, atau pemerintah dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap tantangan dan peluang, dengan harapan mampu membuka ruang sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan, sekaligus mengurangi hal-hal yang menghambat suatu tujuan tertentu (Maulana & Nugroho, 2019).

Anderson mengemukakan kebijakan publik sebagai suatu bentuk tindakan sadar dan terarah yang dilakukan oleh aktor-aktor baik individu maupun kelompok untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pandangannya, ada dua aspek penting dari kebijakan, pertama aspek substantif yang mencerminkan apa yang perlu dilakukan demi kebaikan bersama. Kedua, aspek prosedural yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab serta bagaimana cara kebijakan itu dijalankan, agar tidak hanya bermanfaat, tetapi juga adil dan tepat sasaran (Igirisa, 2022).

Sedangkan Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dye

menyatakan bahwa ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, pasti ada tujuan di baliknya, karena kebijakan publik sebenarnya adalah "tindakan" sesuatu yang dilakukan pemerintah. Dengan cara yang sama, ketika tidak melakukan apa pun yang menjadi pilihan pemerintah, maka tindakan tersebut juga menjadi bagian dari kebijakan publik yang ada tujuannya (Anggara, 2018). Di sisi lain, William Jenkins juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan dari berbagai aktor yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, jika pemerintah ingin membuat kebijakan kesehatan, maka kebijakan tersebut harus melibatkan berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan yang lainnya. Sehingga perlu ditegaskan bahwa William lebih menekankan pada proses perumusan kebijakan publik, sedangkan Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik hanya sebagai pilihan yang dilakukan oleh pemerintah (Abdal, 2015).

Definisi lain dikemukakan oleh Chief J. O. Udoji seorang pakar dari nigeria dalam (Wahab, 2012), kebijakan publik sebagai *“an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large”* (serangkaian tindakan yang disetujui yang ditujukan pada suatu masalah tertentu atau sekelompok masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas). Sedangkan menurut pakar Prancis, Lemieux menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan *“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time”* (produk kegiatan yang dimaksudkan untuk menemukan solusi atas masalah

publik yang ada di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh para aktor politik yang hubungannya terstruktur. Seluruh proses tindakan ini berlangsung sepanjang waktu).

Kebijakan publik terbagi menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan rekomendasi kebijakan. Secara umum, kebijakan publik dilakukan melalui tahap-tahap perumusan isu, implementasi, dan evaluasi. Analisis kebijakan publik adalah penyelidikan dan deskripsi tentang mengapa ada penyebab dan akibat tertentu dari kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, seseorang dapat menganalisis perumusan kebijakan, substansi, dan dampaknya. Di sisi lain, rekomendasi kebijakan secara langsung terkait dengan tindakan pemerintah untuk merekomendasikan beberapa kebijakan melalui diskusi, persuasi, atau aktivisme politik (Anggara, 2018).

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penerapan atau pelaksanaan dari kebijakan. Implementasi kebijakan ini sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam bukunya (Kasmad, 2018) *“Policy implementation encompasses those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, atau organisasi pemerintah atau swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam keputusan kebijakan). Tindakan

tersebut dapat berupa upaya untuk mengubah keputusan menjadi langkah-langkah operasional dalam waktu tertentu maupun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar ataupun kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik, dengan tujuan untuk memenuhi sasaran yang telah ditentukan (Pramono, 2020).

Grindle menyebutkan implementasi melibatkan serangkaian langkah administratif yang sistematis berkaitan dengan program-program tertentu. Prosesnya baru bisa dimulai ketika tujuan yang jelas telah ditetapkan, rencana program telah disusun, dan pendanaan telah cukup dan siap untuk disalurkan demi mencapai sasaran. Sedangkan menurut Dunn dalam (Dunn, 2003) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses pengelolaan dan pelaksanaan langkah-langkah yang ditetapkan dalam suatu kebijakan untuk jangka waktu tertentu. Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan efektif jika tidak diimplementasikan dengan benar. Implementasinya melibatkan aktor, organisasi, prosedur, dan teknis untuk mencapai tujuan kebijakan. Hann dalam (Budiyanti et al., 2020) juga menyatakan terdapat dua pilihan dalam implementasi kebijakan, yaitu menerapkannya sebagai suatu program atau membuat kebijakan lain dari turunannya.

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang

diserahi tugas untuk melaksanakan suatu program. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal dalam kenyataan dapat kita lihat sendiri bahwa betapapun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku (Syahrudin, 2020).

Definisi lain dijelaskan oleh P. Sabatier & Mazmanian dalam (Subianto, 2020) implementasi kebijakan merupakan memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program diterapkan, termasuk peristiwa dan kegiatan yang mengikuti proses pengesahan kebijakan oleh negara. Hal ini mencakup upaya untuk mengelola program tersebut maupun upaya untuk memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat dan acara. Dalam implementasi kebijakan terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu keberhasilan dalam menerapkan kebijakan atau kegagalan dalam penerapan kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan dikarenakan kurangnya hambatan eksternal, sumber daya yang cukup, kebijakan yang disusun dengan baik, pemahaman tujuan dan dukungan dari semua pihak, tugas dilakukan sesuai dengan urutan yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang jelas dan efektif, serta mendapat dukungan dari otoritas yang berwenang. Sedangkan kegagalan

implementasi kebijakan dapat terjadi karena adanya kesenjangan implementasi yang disebabkan oleh kebijakan yang dirancang kurang baik, penerapan yang kurang efektif atau kurangnya komitmen dan dukungan (Budiyanti et al., 2020).

Implementasi kebijakan penting untuk dilaksanakan karena merupakan proses lanjutan dari perumusan masalah yang dimulai ketika masalah dirumuskan, diidentifikasi sampai diimplementasikan. Implementasi kebijakan ini didorong oleh para pengambil keputusan yang memegang kekuasaan hierarkis dan bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan suatu kebijakan. Keputusan-keputusan ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah yang kemudian akan diimplementasikan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan biasanya melibatkan para aktor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, khususnya para pegawai birokrasi yang dapat memberikan pengaruh signifikan dalam proses implementasi kebijakan ini (Anggara Setya Saputra et al., 2022).

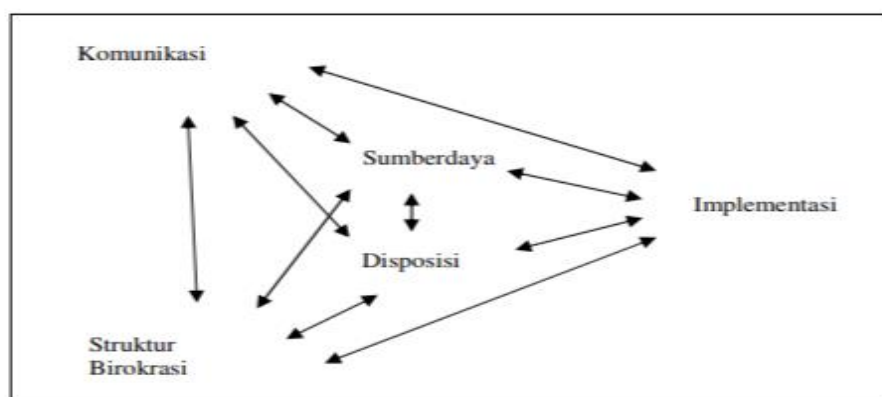
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III menjelaskan dalam buku “Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas” karya Prof. DR. Yulianto Kadji, M.Si. *“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers”* (Kadji, 2015).

Maksudnya implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial bagi kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan,

seperti yang telah kita lihat, adalah tahapan dari pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan seperti pasal undang-undang legislatif, penerbitan peraturan eksekutif, penetapan keputusan pengadilan, atau penetapan peraturan perundang-undangan, dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Meskipun suatu kebijakan telah dirancang dengan baik, namun masih ada risiko kegagalan jika implementasinya tidak baik. Bahkan kebijakan yang handal sekalipun dapat gagal mencapai tujuan yang diharapkan jika proses implementasinya tidak dilakukan secara optimal dan efektif (Kadji, 2015).

Menurut Edward III terdapat beberapa aspek yang dapat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya, dan disposisi atau sikap pelaksana. Dari keempat aspek tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan baik secara langsung maupun tak langsung (Wahyudi, 2016).



Gambar 2. 1. Implementasi Kebijakan George C. Edward III

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses pembuatan kebijakan sekaligus kajian yang krusial. Bersifat krusial

karena terletak pada kenyataan bahwa suatu kebijakan yang telah disusun dengan baik, dapat mengalami kegagalan untuk mencapai tujuannya jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya. Kebijakan yang efektif sangat bergantung pada komunikasi dan kerja sama yang baik antara lembaga terkait. Menjaga hubungan yang baik antara lembaga-lembaga tersebut dapat memastikan lancarnya koordinasi, keberhasilan implementasi program, serta mendorong pencapaian tujuan program (Setyawan & Srihardjono, 2016). Jadi, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang jelas diantara semua pihak yang terlibat. Para pelaksana kebijakan perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang peran dan tanggung jawab mereka, sementara kelompok sasaran harus diinformasikan terlebih dahulu agar sepenuhnya menyadari tujuan dan sasaran kebijakan. Transparansi ini membantu meminimalkan penolakan dan mendorong kerja sama, yang akan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan (Pramono, 2020).

Terdapat tiga komponen untuk mengukur keberhasilan komunikasi (Sutmasa, 2021), sebagai berikut:

- 1) Transmisi, penyampaian komunikasi yang efektif mengarah langsung pada keberhasilan implementasi. Akan tetapi, yang sering terjadi dalam proses penyampaian komunikasi adalah adanya kesalahpahaman (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melewati beberapa tahap birokrasi sehingga apa yang diharapkan menjadi tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, sebelum seorang pejabat melaksanakan sebuah keputusan, sangat penting bagi mereka

untuk memahami sepenuhnya bahwa keputusan tersebut telah ditetapkan dan instruksi pelaksanaannya telah disampaikan. Tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi pejabat juga harus benar-benar memahami isi dan maksud dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan dalam proses penyampaian informasi menjadi elemen kunci untuk mencegah kesalahpahaman serta kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap alur penyampaian informasi menjadi fondasi awal yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

- 2) Kejelasan, para pelaksana kebijakan memerlukan komunikasi yang mudah dipahami dan tidak rancu. Oleh karena itu, instruksi pelaksanaan harus sangat jelas sehingga tidak akan menimbulkan salah tafsir atau makna yang bertentangan dengan tujuan awal kebijakan. Kurangnya kejelasan instruksi akan menyebabkan implementasi keliru dan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang jelas berperan penting dalam memungkinkan semua pihak yang terkait memahami instruksi dengan baik dan dengan demikian proses implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.
- 3) Konsistensi, dalam berkomunikasi perintah yang disampaikan harus tetap konsisten (tidak berubah) dan dapat dipahami dengan mudah. Karena penyampaian yang konsisten merupakan faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat. Tanpa

adanya konsistensi, para pelaksana kebijakan sering kali mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan kebijakan dengan benar, yang pada akhirnya dapat memicu kesalahan tindakan dan menurunkan efektivitas implementasi. Tingkat konsistensi dalam keputusan kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompleksitas kebijakan publik, tantangan dari program yang baru diterapkan, serta ketidakjelasan dalam tujuan kebijakan itu sendiri. Edwards menekankan bahwa dengan mempelajari hubungan antara komunikasi dan implementasi dapat menunjukkan semakin jelas dan tepat keputusan serta instruksi yang dikomunikasikan kepada pelaksana, maka semakin besar pula kemungkinan keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Struktur Birokrasi

Struktural birokrasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan, hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut (Pramono, 2020). Struktur birokrasi atau organisasi dapat dipahami sebagai pola yang menggambarkan hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan (Setyawan & Srihardjono, 2016). Kewenangan merupakan legitimasi yang diberikan kepada individu atau organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi atau tingkat yang berbeda sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama sistem birokrasi

tertuang dalam Standard Operating Procedures (SOP) dan pembagian tanggung jawab dalam organisasi (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

3. Sumber Daya

Van Matter dan Van Horn menekankan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan. Terutama sumber daya manusia (human resources), karena manusia sebagai subjek sekaligus objek dari implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat sumber daya material (material resources) dan sumber daya metode (method resources). Ketiga komponen sumber daya ini memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan (Setyawan & Srihardjono, 2016).

Menurut Edward sumber daya yang penting untuk penyediaan layanan publik yaitu jumlah staf yang cukup dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Selain itu, sumber daya yang tak kalah penting terkait wewenang dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengubah rencana tertulis menjadi pelayanan publik yang nyata. Struktur birokrasi yang kompleks bergantung pada dua karakteristik utama, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau standar pengukuran diciptakan sebagai respons internal perusahaan untuk mengatasi keterbatasan waktu dan sumber dari para pelaksana. SOP ini juga membantu untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang tersebar luas dan kompleks. Sedangkan fragmentasi dalam lembaga pemerintah muncul tidak hanya dari faktor internal, tetapi berasal dari tekanan eksternal seperti komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat eksekutif,

pemimpin politik, kendala konstitusional, serta kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap lembaga pemerintah (Pramono, 2020).

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Yang dimaksud disposisi disini berkaitan dengan kepribadian dan sifat implementator yang bertanggung jawab memegang peranan penting. Sifat-sifat ini meliputi dedikasi, integritas, dan keyakinan akan kolaborasi. Sifat yang dimiliki oleh implementator merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Pramono, 2020).

Menurut Edward III, disposisi kebijakan mengacu pada kesediaan dan motivasi pembuat kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Disposisi ini muncul ketika pembuat kebijakan berkeyakinan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan organisasinya, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Keyakinan akan keuntungan yang diperoleh dari kebijakan, dipadukan dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan tersebut, sehingga menciptakan dorongan untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh (Setyawan & Srihardjono, 2016).

Variabel-variabel disposisi dalam (Sutmasa, 2021), yaitu:

- 1) Pemilihan birokrasi, mereka yang dipilih dan ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan harus berkomitmen terhadap kebijakan tersebut, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat umum.
- 2) Insentif, untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, penting untuk mengubah insentif yang mendorong perilaku pelaksana

kebijakan. Seperti meningkatkan keuntungan finansial atau menyelaraskannya dengan tujuan pribadi. Dengan mengubah insentif ini, pelaksana kebijakan akan cenderung melaksanakan kebijakan secara efektif karena kepentingan pribadinya diperhitungkan.

2.3 Komunikasi Kebijakan

2.3.1 Konsep Komunikasi Kebijakan

Menurut Agustino, komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, karena dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan Cook & Hunsaker menambahkan bahwa komunikasi bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyampaikan informasi, serta memenuhi kebutuhan sosial individu dalam organisasi. Oleh karena itu, komunikasi dipandang sebagai aset berharga yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Jika komunikasi dilakukan secara efektif dan sejalan dengan nilai-nilai organisasi, maka akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan organisasi (Ayuningtyas & Rahman, 2019).

Komunikasi melibatkan berbagai elemen, seperti pelaku komunikasi, pesan (format, isi, dan cara penyampaian), bentuk komunikasi, media atau saluran yang digunakan, waktu dan lokasi komunikasi, dampak yang ditimbulkan, potensi hambatan, serta konteks di mana komunikasi itu terjadi. Keseluruhan elemen ini membentuk satu kesatuan proses komunikasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, terdapat empat tahapan utama yang diamati secara berurutan dalam proses komunikasi (Tamrin et al., 2023) sebagai berikut:

1. Pengirim pesan (komunikator), pihak berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan pesan.
2. Konten komunikasi, mencakup simbol-simbol atau tanda-tanda seperti kata-kata (baik lisan maupun tulisan), gambar, hingga angka yang membentuk makna pesan.
3. Saluran komunikasi (media/kanal), sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya melalui radio, surat, media cetak seperti koran dan majalah, televisi, atau melalui interaksi langsung secara tatap muka.
4. Penerima pesan (komunikan), individu, kelompok, atau institusi yang menjadi sasaran dari pesan atau informasi yang dikirimkan.

Menurut Abdul Wahab dalam (Ayuningtyas & Rahman, 2019) komunikasi kebijakan pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung di lingkungan pemerintahan. Sehingga komunikasi ini dimaknai sebagai proses penyampaian pesan, program, maupun ide-ide pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan negara.

Dalam komunikasi kebijakan, pesan yang disampaikan tidak semata-mata berupa informasi faktual, tetapi juga mencakup penyebaran gagasan, arahan, dan perasaan yang berhubungan dengan kebijakan serta tindakan pemerintah. Aparatur birokrasi berperan sebagai pelaku komunikasi yang berinteraksi secara aktif dengan pihak-pihak lain (komunikan), melalui pertukaran ide, emosi, serta perspektif untuk menciptakan pemahaman bersama (Tamrin et al., 2023).

Dalam komunikasi kebijakan penting untuk melibatkan sosialisasi kebijakan, advokasi kebijakan dan partisipasi publik. Sosialisasi kebijakan merupakan proses penyebaran informasi yang bertujuan untuk menyampaikan isi atau substansi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berfungsi sebagai bentuk penjabaran kebijakan agar dapat dipahami secara menyeluruh oleh pihak-pihak terkait (Dian Herdiana, 2018). Advokasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara strategis untuk memengaruhi para pengambil keputusan dan masyarakat luas, dengan tujuan mendorong perubahan, mempertahankan, atau melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan tertentu melalui pendekatan komunikasi yang terencana dan terarah (Astuti, 2021). Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai tahapan proses kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan ini berperan penting dalam meningkatkan legitimasi serta efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan (Mozin et al., 2025).

2.3.2 Jenis Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Di mana kedua jenis komunikasi tersebut memiliki peran penting dalam menyampaikan suatu kebijakan (Yasmin, 2021).

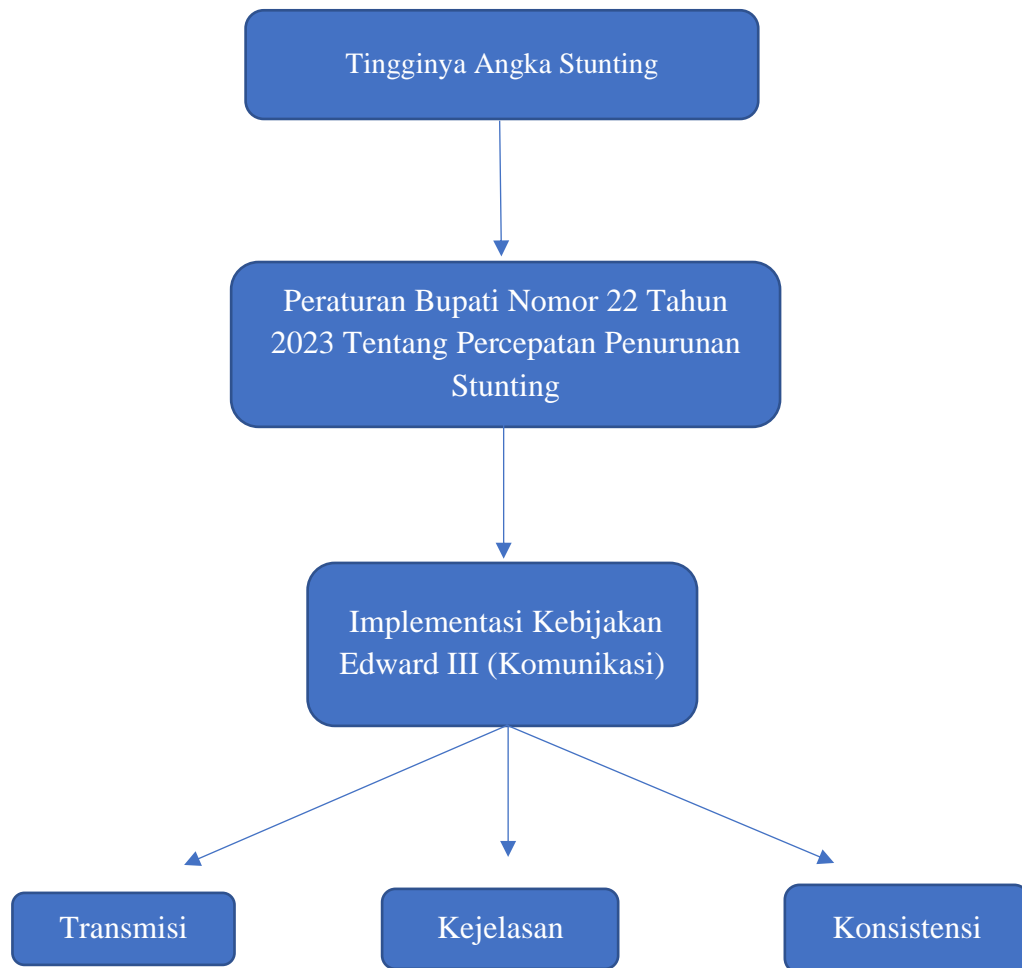
- 1) Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks kebijakan, bentuk komunikasi ini bisa berupa pidato, presentasi, rapat, surat resmi, atau dokumen yang memuat penjelasan mengenai isi dan tujuan suatu

kebijakan. Keunggulan komunikasi verbal terletak pada kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami oleh penerima pesan. Dalam praktiknya, komunikasi verbal sering digunakan untuk memberikan arahan, menjelaskan regulasi, atau mengumumkan kebijakan melalui interaksi langsung maupun media tertulis.

- 2) Komunikasi nonverbal merupakan bentuk penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, postur, kontak mata, dan berbagai isyarat lainnya. Dalam konteks kebijakan, komunikasi nonverbal berperan penting dalam memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Misalnya, bahasa tubuh yang tegas bisa menunjukkan kesungguhan seorang pejabat dalam menyampaikan kebijakan, ekspresi wajah bisa menegaskan sikap emosional terhadap isu tertentu, sementara simbol atau penampilan dapat mencerminkan nilai-nilai yang diusung oleh kebijakan tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran

Tabel 2. 1 Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang diusulkan berfokus pada komunikasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Di mana pada saat ini angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi belum mencapai target nasional yaitu 14% pada tahun 2024. Sehingga pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang berfokus pada komponen komunikasi. Di mana nantinya akan menganalisis

indikator-indikator yang ada dalam komunikasi Edward III yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Indikator-indikator komunikasi tersebut menjadi kunci untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Hasil dari komunikasi kebijakan yang efektif diharapkan dapat mengatasi penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya, sejalan dengan strategi dan program-program yang telah dirancang untuk percepatan penurunan stunting. Pendekatan yang komprehensif dalam pengkomunikasian terkait percepatan penurunan stunting tidak hanya melibatkan kebijakan yang tepat, tetapi mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih sadar akan bahayanya stunting sehingga bisa lebih memperhatikan penyebab dari stunting itu sendiri. Melalui komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan angka stunting dapat berkurang demi tercapainya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama bagi anak penderita stunting.